

## PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI DALAM MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME MAHASISWA

**Endang Koesmiyati**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Wisnuwardhana Malang  
Email: endangkoesm@gmail.com

***Abstract:** The growth of science and technology that is increasingly modern lately demands a high morality and understanding of nationalism, because science and knowledge that is not accompanied by a high level of nationalism and morality causes education, especially civic education loses its virtue as a humanist forum. Not a few people have good citizenship knowledge and outstanding academic achievements but do not provide significant benefits in their community, even become a source of problems for the community which is very dangerous for the existence of culture and human values because of the spirit of nationalism and low morality. Negative effects of globalization such as immoral cases committed by students in universities and intellectuals, as we have known through television broadcasts and mass media lately. It illustrates that the education carried out so far has not touched the realm of student awareness.*

***Keywords:** Civic Education, Globalization, Nationalism.*

### PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia (Edison, 2005:12). Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat pada Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi negeri dan swasta, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris mata ajar wajib Perguruan Tinggi. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang

semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas, misalnya dalam lingkup negara-negara ASEAN, mau tidak mau dunia pendidikan di Indonesia harus menghasilkan lulusan yang siap kerja agar tidak menjadi “budak” di negeri sendiri.

Pelajaran PKn serta pendidikan moral yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas, belum mampu menjiwai setiap gerak gerik mahasiswa dalam kehidupan di lingkungan masyarakatnya. Hal ini tentunya, disebabkan oleh minimnya proses belajar yang diinginkan mahasiswa, pokok bahasan pelajaran PKn dianggap sebagai pelajaran yang harus dihapal, kemudian ditagih disaat ujian tengah semester (UTS) ataupun Ujian Akhir semester. Setelah UTS atau UAS selesai, materi itupun dilupakan tanpa bekas. Yang lebih serius lagi, di Perguruan Tinggi selama ini pembelajaran terkesan tidak ubahnya seperti pembelajaran di SMA, dimana mahasiswa dikekang dengan aturan yang serba ketat dan materi pelajaran yang begitu padat dan tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hampir ide yang berasal dari mahasiswa dapat berkembang dan menjadi perhatian. kenyataannya, ketika mahasiswa selesai ujian akhir Semester (UAS), mereka dengan meriahnya mencoret coret baju, berteriak dijalan dan ngebut-ngebutan. Seolah-olah mereka sudah bebas dan lepas dari semua pengekangan.

Seperti inilah gambaran pendidikan Indonesia selama ini. Apabila kondisi ini diabaikan, maka bisa jadi masyarakat akan menjadi masyarakat yang rusak dan tidak memiliki nilai-nilai budaya yang harus dijunjung tinggi, masyarakat yang melupakan jati dirinya sendiri. Masyarakat yang cerdas dari sisi keilmuan, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami orang lain bahkan masyarakat yang tidak tahu dari mana dan kemana tujuan mereka. Di sini akan terlihat masyarakat pada kondisi yang sangat memperhatikan, karena jauh dari nilai-nilai moral dan budaya yang ada. Untuk itu, peranan dosen sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai spiritual dan moralitas sedini mungkin, tentunya melalui pembelajaran yang memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mampu memahami diri dan orang lain disekitarnya serta mampu memahami dan menjiwai semangat ke PKn an yang sifatnya doktrinal secara baik dan benar. Dosen hendaknya mampu berperan sebagai pembimbing untuk menuntun mahasiswa memulai proses belajar, memimpin mahasiswa agar hasil proses belajar sesuai dengan tujuan pengajaran, serta sebagai fasilitator dalam mempersiapkan kondisi yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar.

Hal ini dapat dilakukan oleh para dosen mulai dari pemilihan tehnik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan Standar materi PKn, serta karakteristik pembelajaran, dan pemilihan strategi yang tepat dalam menerapkan pembelajaran PKn di Kelas. Terdapat semacam sinyalemen, bahwa harapan tumbuhnya sifat kreatif dan antisipatif serta inovatif para dosen PKn dalam praktek pembelajaran untuk pemahaman mahasiswa dewasa ini masih belum memadai. Semua ini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas proses dan produk pembelajaran PKn. Kualitas proses pembelajaran PKn dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran yang tidak lebih dari kegiatan pembelajaran yang bersifat keseharian, dimana materi pembelajaran tidak sampai menyentuh kesadaran

mahasiswa, melainkan hanya sekadar sebagai syarat kelulusan ujian Perguruan Tinggi yang materi ajarannya harus dihafal sesuai dengan buku teks.

Produk pembelajaran ini, jelas tidak memberikan makna apa-apa dalam pembentukan moral, etika dan mental mahasiswa apalagi perubahan watak mahasiswa, sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Tidak sedikit hambatan dalam mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, hambatan dalam proses merupakan inti dari proses pendidikan formal di Perguruan Tinggi yang di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu: dosen, isi materi, dan mahasiswa. Hubungan timbal balik antara ketiga elemen utama tersebut melibatkan sarana dan prasarana seperti: model dan metode pembelajaran yang digunakan, media, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan**

Dimulainya era globalisasi dengan ciri-ciri adanya saling keterbukaan dan ketergantungan antarnegara sehingga negara tidak mengenal batas batasnya. Akibat saling keterbukaan dan ketergantungan ditambah dengan arus informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat maka persaingan Internasional pun akan semakin ketat terutama pada bidang ekonomi. Khususnya bagi Indonesia globalisasi ini tidak hanya diarahkan pada kepentingan dalam negeri akan tetapi juga diarahkan pada kepentingan global. Dari segi kepentingan dalam negeri globalisasi ini memberi peluang positif terutama untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat menjadikan masyarakat untuk memiliki pola pikir global dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, memiliki etos kerja, kreatif, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja. Dari segi global, hidup di dalam dunia lebih yang terbuka, dunia yang tanpa batas. Perdagangan bebas serta makin meningkatnya kerjasama regional misalnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) memerlukan manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Kehidupan global merupakan tantangan sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan bagi SDM Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja di luar negeri. Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia baik untuk memenuhi SDM yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.

Tampubolon, (2001:7-11) mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat industri dan panca industri, Indonesia berada di bawah pengaruh empat proses perkembangan sosial yang mendasar dalam abad ke-21, bahkan sesungguhnya sudah mulai dalam tiga dekade terakhir abad ke-20. Globalisasi diartikan sebagai proses saling berhubungan yang mendunia antarindividu, bangsa dan negara, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, terutama perusahaan. Proses ini dibantu berbagai alat komunikasi dan transportasi yang berteknologi canggih, dibarengi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi serta nilai-nilai sosial-budaya yang saling mempengaruhi. .

Menurut Sindhunata (2000) mengemukakan bahwa Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia kini bukan saja saling terbuka satu sama lain, tapi juga saling tergantung satu sama lain, walaupun ketergantungan itu akan senantiasa bersifat asimetris, artinya satu Negara lebih tergantung pada negara lain daripada sebaliknya. Karena saling ketergantungan dan keterbukaan ini tidak simetris, pengaruh globalisasi atas berbagai negara juga berbeda kadarnya. Negara-negara berkembang akan cenderung lebih terbuka pada pengaruh globalisasi dari pada negara-negara industri maju, karena ketergantungan kelompok negara-negara pertama pada kelompok negara kedua yang memiliki kemampuan ekonomi, sumber daya manusia, dan teknologi. Demikian juga negara-negara maju akan bertindak sebagai pelaku atau subjek, sedangkan kelompok negara berkembang lebih sebagai sasaran atau objek globalisasi.

Dalam konteks pengertian globalisasi di atas, dapat diprediksi dampaknya terhadap kelompok negara-negara berkembang sebagai berikut: (1) kelompok negara-negara maju akan lebih dominan pengaruhnya terhadap kelompok negara-negara berkembang terutama pada bidang politik dan ekonomi; (2) kelompok negara-negara berkembang tetap pada posisi yang lemah dalam berkompetisi, walaupun secara teori kompetisi itu dilakukan dalam konteks kerjasama; (3) terjadi perubahan dalam cara kehidupan masyarakat terutama generasi muda yang tinggal di kota-kota; (4) semakin mudahnya komunikasi internasional, masyarakat dapat mengetahui inovasi global tentang perkembangan ilmu dan teknologi, sebaliknya dapat membawa pengaruh negatif pada kehidupan generasi muda. Contohnya adalah masalah Narkoba yang sudah melanda generasi muda Indonesia termasuk mahasiswa.

Untuk menjawab tantangan sekaligus peluang kehidupan global di atas, diperlukan paradigma baru pendidikan. Tilar (2000:19-23) mengemukakan pokok-pokok paradigma baru pendidikan sebagai berikut: (1) pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis; (2) masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis; (3) pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global; (4) pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis; (5) di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerjasama; (6) pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat, dan (7) yang paling penting, pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga Negara Indonesia.

Globalisasi yang membawa gaya hidup kebarat baratan cenderung melemahkan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini tentunya bertentangan dengan kenyataan hidup bahwa manusia itu pertama dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Globalisasi haruslah bertumpu dari lokalisme yaitu bertumpu kepada nilai-nilai lokal yang relevan dengan perubahan zaman. Nilai-nilai lokal sebagai modal pertama dari hal baru yang disodorkan oleh budaya global. Tanpa kuatnya nilai-nilai lokal yang hidup dalam seorang individu, tidak mungkin ia

memasuki dunia global dengan kekuatan-kekuatannya yang sangat hebat, sehingga dengan demikian pribadi itu akan hanyut dibawa arus globalisasi tanpa tepi. Globalisasi tidak dengan sendirinya membawa nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu hanya nilai-nilai global yang ikut memelihara dan mengembangkan nilai-nilai lokal yang perlu disimak untuk diserap didalam proses pendidikan suatu masyarakat atau bangsa (Tilaar, 2005;28)

Konflik-konflik sosial, tindakan-tindakan diskriminasi, perilaku yang eksklusif dan primordial muncul karena belum semua masyarakat merasa, menghayati dan bangga sebagai insan Indonesia. Dan di sinilah para pemimpin formal dan informal pada semua aspek kehidupan harus menjadi teladan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru dengan prinsip-prinsip: (1) partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan (*community based education*); (2) demokratisasi proses pendidikan; (3) sumber daya pendidikan yang profesional; dan (4) sumber daya penunjang yang memadai.

Paradigma baru pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada Perguruan Tinggi, akan tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam arti Perguruan Tinggi dan masyarakat sama-sama memikul tanggung jawab. Dalam paradigma baru ini, masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan, tiba-tiba ditantang menjadi penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung Perguruan Tinggi dan membayar uang Perguruan Tinggi, akan tetapi yang lebih penting masyarakat ditantang untuk turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak kendala yang mempengaruhi, antara lain: (1) bagi masyarakat hal ini merupakan masalah baru sehingga perlu proses sosialisasi; (2) bagi masyarakat yang tinggal di ibukota propinsi, kotamadya dan kabupaten, masalahnya lebih sederhana karena tingkat pendidikan dan ekonomi relatif baik, sehingga tidak sulit menyeleksi orang-orang yang akan duduk pada posisi tanggung jawab ini; (3) bagi masyarakat yang tinggal di ibukota kecamatan dan desa masalahnya menjadi rumit karena tingkat pendidikan masyarakatnya rendah dengan kondisi kehidupan miskin.

## **2. Paradigma Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi**

Paradigma pendidikan di Perguruan Tinggi terkait dengan 4 (empat) hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan, yaitu peserta didik (mahasiswa), dosen, materi dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, paling tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang paradoksal yaitu paradigma feodalistik dan paradigma humanistik. Paradigma feodalistik mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk masa datang. Oleh karena itu peserta didik (mahasiswa), ditempatkan sebagai objek semata dalam pembelajaran, sedangkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu kebenaran dan informasi, berperilaku otoriter dan birokratis. Materi pembelajaran disusun secara rigid sehingga memasung kreativitas mahasiswa dan dosen. Sementara itu, manajemen pendidikan termasuk

manajemen pembelajaran bersifat sentralistik, birokratis dan monolitik. Dalam penerapan strategi pembelajarannya, sangat dogmatis, indoktrinatif dan otoriter.

Sementara itu paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik (Mahasiswa) adalah manusia yang mempunyai potensi karakteristik yang berbedabeda. Karena itu, dalam pandangan ini mahasiswa ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Juga manajemen pendidikan dan pembelajarannya menekankan pada dimensi desentralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis. Mencermati arah perubahan dan penyempurnaan rambu-rambu pelaksanaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti di atas, telah mengindikasikan mempergunakan paradigma humanistik.

Pendidikan PKn di Perguruan Tinggi masih diandaikan hanya sebatas doktrin Negara. Padahal ilmu-ilmu PKn telah berkembang luas melampaui batas-batas doktrin Negara. Kajian social mengenai perilaku warga negara berPKn juga adalah kajian PKn. Dengan demikian, pengajaran PKn di lembaga-lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar-standar ilmiah. Dengan begitu, para mahasiswa akan memiliki pengetahuan PKn secara objektif dan tidak berdasar kepada pengetahuan subjektif belaka..

Dalam hal ini Tilaar (2005;14) berpandangan bahwa semakin banyak pihak yang peduli dan mengupayakan pembentukan manusia Indonesia menjadi religius, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur semakin baiklah adanya. Negara, dalam kasus ini tidaklah masuk ke urusan privat melainkan ke urusan sosial, yakni sebatas menjaga tegaknya social fairness dalam pelaksanaan pengajaran PKn di Perguruan Tinggi, demi keharmonisan kehidupan bersama antar warga negara. Kalau mahasiswa diajar PKn sesuai dengan PKn yang dipahaminya dan diajar oleh dosen PKn (inilah yang diatur oleh negara melalui Undang-Undang tersebut), kiranya rasa keadilan masyarakat tidak perlu terusik. Lagi pula, dengan cara demikian Perguruan Tinggi swasta bermisi kePKnan akan lebih terdorong untuk melakukan "promosi" PKn tidak secara vulgar di kelas dengan mengajarkan PKn pada mahasiswa.

Mengingat pentingnya pembangunan karakter mahasiswa, meskipun pendidikan PKn sudah dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, akan lebih baik kalau juga dilakukan Perguruan Tinggi. Yang menjadi masalah adalah paradigma pendidikan PKn seperti apakah yang dikembangkan Perguruan Tinggi selama ini. Masih sangat mengecewakannya perilaku moral mahasiswa, juga masih sering terjadinya ketegangan dan keretakan sosial bernuansa PKn (seperti yang berlangsung di seputar masalah UU Sisdiknas) serta maraknya fenomena kemerosotan moral masyarakat, menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pembelajaran pendidikan PKn di Perguruan Tinggi. Pendidikan PKn di Perguruan Tinggi masih jauh dari signifikansi peranannya dalam membangun moral bangsa. Salah kaprah mengenai pendidikan PKn juga menyebabkan menyempitnya ruang lingkup pendidikan PKn di Perguruan Tinggi.

Menurut Maksum dan Faisal (2016) menyatakan bahwa aspek-aspek pendidikan PKn di Perguruan Tinggi haruslah dengan urutan skala prioritas dan garapan materi pendidikan seperti berikut ini; 1) pendidikan PKn sebaiknya mengutamakan dimensi konsekuensial keberPKnan. Ajak dan latih mahasiswa untuk mempraktikkan suruhan-suruhan atau nilai-nilai PKn dalam kehidupan nyata di masyarakat, seperti menjaga kebersihan, bertindak jujur dalam ujian, tolong-menolong untuk kebaikan, menghargai orang lain, dan lain-lain sebagai bagian dari ekspresi iman mereka. Latih mahasiswa menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Ajak mahasiswa mengunjungi orang lain dan buatlah kegiatan bersama untuk membangun sikap Nasionalisme, penghargaan, toleransi, dan kerjasama antar warga negara. Ajarkan bahwa PKn adalah rahmat bagi kehidupan bersama. PKn harus menjadi faktor perekat, bukan factor disintegratif; faktor solusi, bukan faktor masalah. Sebab, semua warga negara mendambakan kehidupan warga negara manusia yang damai, sejahtera, dan berkualitas. Mahasiswa penting disadarkan bahwa keberPKnan haruslah membuahkan perilaku hidup baik. Tanpa itu, betapapun "rimbunnya" tampilan keberPKnan seseorang, itu bagaikan kerimbunan ilalang belaka; 2) dimensi eksperiensial digarap dengan upaya-upaya menghadirkan Tuhan dalam kesadaran mahasiswa di setiap saat dalam ketakjuban pada keindahan, kedahsyatan, dan kecanggihan alam semesta ciptaan Tuhan, serta dalam aktivitas keseharian mahasiswa. Dengan begitu, Tuhan tidak hanya dihadirkan pada momen-momen eksklusif ritual saja, melainkan terus menerus dalam setiap langkah kehidupan; dan 3) pengolahan dimensi ideologis dilakukan dengan tetap mengedepankan perlunya sikap nasionalisme. Keyakinan pada kebenaran yang dipahami mahasiswa tidak boleh menghasilkan fanatisme sempit, arogansi religius, kelumpuhan akal, dan sikap anti-dialog. Kebenaran Ilahi tersebar di mana-mana. Tanpa kesadaran ini orang mudah tergoda untuk melakukan tindakan lain dengan dalih penyelamatan yang berakibat keretakan sosial.

### **3. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaran (PKn) di Perguruan Tinggi**

PKn bagaikan rel yang menuntun warga negara dalam menuju warga negara yang baik, yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam berbagai realitas sosial nasionalisme kerap menjadi kambing hitam dari sebuah konflik yang umumnya bukan semata-mata berasal dari perbedaan SARA tersebut. Sebut saja konflik yang terjadi dinegeri sendiri seperti Ambon dan Poso atau bahkan yang terjadi di Somalia ataupun Isarel-Palestina. Dan, maraknya kembali aksi-aksi terorisme yang berjubahkan nasionalisme membuat kita semakin bertanya tentang peran pendidikan PKn di dunia Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Wisnuwardhana Malang. Seakan pendidikan PKn tidak mampu menjawab perkembangan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Pendidikan PKn di Perguruan Tinggi Tinggi umum selama ini hanya dilihat dalam tataran tekstual dan kalau pun secara praktis tidak lebih dari pesraman kilat yang sebenarnya hanya mengisi waktu kosong Perguruan Tinggi dibulan libur dan sebagai ajang bisnis para dosen-dosen PKn. Maka, tidaklah mengherankan PKn justru sering kali dijadikan landasan untuk menciptakan konflik.

Pada konteks saat ini, dimana kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, dan kesadaran terhadap pluralitas masyarakat menjadi tuntutan, maka pertanyaan yang timbul adalah masih relevankah pengajaran PKn pada lembaga pendidikan? Padahal kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi belum mampu melahirkan individu-individu yang berkualitas, yang hanya mau menerima kebenaran moralnya, yang menjadikan individu sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari individu lain. Kita juga sulit mengelak ketika PKn dinyatakan belum mampu dijadikan kosensus pemecah-belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Kita melihat bahwa pendidikan PKn hanyalah sebuah indoktrinasi yang belum mampu mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan meluas menghadapkan manusia kembali dengan dirinya sebagai mahluk susila dan mempertanyakan kembali makna dan arti hidupnya. Penghadapan ini berkisar disekitar nilai-nilai konfigurasi nilai-nilai yang dipegangnya, haikatnya bersumber pada PKn. Maka, mau tak mau seseorang yang berPKn terpaksa merenungkan arti pembangunan dan perubahan-perubahan sosial yang dialaminya serta kelakuan sendiri dalam keadaan baru dari perspektif masyarakat. Karena keberadaan, manusia mampu untuk membangun dan menjaga hukum keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga tidak terhanyut dalam pengejaran dunia materialisme yang berlebihan. Moral yang baik membuahkan karakter yang baik menurut kaidah-kaidah nilai karakter dan usaha pembangunan sosial pada hakikatnya merupakan perluasan amal untuk menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan, bukan hanya pada tingkat individual, melainkan sebagai masalah struktural masyarakat.

Pemahaman PKn secara tekstual dan kontekstual merupakan dua cara memahami konsep yang mempunyai efek yang luar biasa berbeda. Mengajarkan warga negara untuk bias memahami sebuah sloka secara kontekstual dengan tanpa keluar dari koridor-koridor nilai yang terkandung didalamnya memang tidak mudah dan memakan waktu yang lama. Memang sangat lebih mudah untuk mengajarkan warga negara supaya hafal teksnya saja. Pemahaman hakiki dari sebuah sloka adalah hasil dari perenungan pribadi dengan bantuan penerangan batin dari sumbernya. Peran pengajar PKn hanya sebatas mengarahkan dan memberikan panduan supaya pemahaman tersebut tidak lepas dari hakikatnya. Tetapi banyak dari pengajar

PKn yang mengambil peran sebaliknya. Mereka mendominasi dan memaksakan arti dari sebuah sloka kepada warga negaranya. Warga negara hanya boleh patuh secara total, tanpa boleh berpikir secara kritis sedikitpun. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pengetahuan tentang kenyataan – kenyataan sosial yang ada dan kemampuan untuk menilai kenyataan-kenyataan sosial berdasarkan kriteria yang ditarik dari suatu sistem nilai. Pendidikan PKn dalam membentuk manusia susila tidak dapat dan tidak boleh berjalan sendiri, kalau pendidikan PKn ingin mempunyai relevansi terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ia harus berjalan dan bekerja sama dengan berbagai program mata pelajaran pendidikan non PKn. Karena apabila tidak ada sinkronisasi antara mata pelajaran pendidikan PKn dan pendidikan non PKn, maka pendidikan PKn hanya akan menjadi “hiasan



kurikulum” belaka, yang berarti pendidikan PKn yang hadir di dalam dunia Perguruan Tinggi selama ini tidak untuk membantu terciptanya suatu generasi baru yang lebih mampu dalam mengelola perubahan-perubahan sosial di masyarakat dan pembangunan bangsa pun tidak akan pernah berubah, bangsa ini hanya tinggal menunggu detik-detik kehancurannya.

Kelompok fundamentalis PKn menyatakan bahwa kegagalan pengajaran PKn membentuk moral di Indonesia adalah karena PKn yang disampaikan dalam pendidikan saat ini telah jauh melenceng dari jalan yang benar, karena itu meskipun Indonesia mengklaim diri sebagai bangsa beragama tetapi memiliki moral terburuk. Anggapan ini sebenarnya tak lebih dari ungkapan frustrasi melihat gagalnya pengajaran PKn di lembaga pendidikan. Betapa tidak, berkaca pada negara lain yang lebih sekular, ternyata tata kehidupan mereka lebih tidak korup, lebih bersih dan beretika.

Pendidikan PKn mempunyai peran besar sekali untuk menimbulkan perubahan pada diri warga negara. Melalui pendidikan dapat dibentuk kondisi mental yang lebih kondusif untuk mengembangkan kebangkitan moral-spiritual yang dikehendaki. Demikian pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diusahakan melalui pelaksanaan pendidikan yang tepat. Namun harus pula disadari bahwa hasil dari proses pendidikan baru terasa secara sungguh-sungguh setelah berlalunya satu generasi. Pendidikan harus dibarengi dengan terbentuknya Kepemimpinan yang dapat menjalankan proses perubahan tersebut sejak sekarang. Bahkan Kepemimpinan itu sangat penting untuk menimbulkan proses pendidikan yang diperlukan.

Proses pendidikan meliputi banyak segi, dan setiap kegiatan manusia mengandung unsur pendidikan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan meliputi system Perguruan Tinggi dan pendidikan luar Perguruan Tinggi. Dua hal itu harus saling mendukung untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam pendidikan luar Perguruan Tinggi yang amat besar perannya adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Sebab di lingkungan keluarga manusia lahir dan tumbuh di masa yang paling menentukan bagi pembentukan kepribadiannya. Hal ini terutama terasa dalam globalisasi yang membuat setiap unsur masyarakat makin intensif hubungannya dengan unsur masyarakat lainnya, demikian pula dengan unsur masyarakat luar negeri. Hubungan itu dapat berupa kerjasama atau persaingan yang dalam globalisasi makin intensif kondisinya. Akibatnya adalah bahwa tidak cukup hanya sebagian kecil masyarakat bermutu tinggi untuk mencapai kemajuan satu bangsa atau satu warga negara. Harus sebanyak mungkin warga masyarakat mempunyai mutu tinggi untuk dapat melakukan kerjasama dan persaingan bangsa dan warga negara. Hal ini menimbulkan tantangan yang amat berat, yaitu harus ada pendidikan yang besar kuantitasnya sehingga meliputi sebanyak mungkin warga masyarakat, maupun setinggi mungkin kualitasnya untuk seluruh pendidikan yang diselenggarakan. Hal ini merupakan tantangan besar untuk pengadaan dan penyediaan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya uang maupun sumberdaya material. Dan karena sumberdaya pada dasarnya adalah langka, maka timbul tantangan kuat terhadap kemampuan manajemen pendidikan di satu pihak dan

di pihak lain adanya komitmen yang kuat pada kepemimpinan bangsa untuk pengadaan sumberdaya itu.

Tantangan sangat besar yang harus dijawab oleh setiap Perguruan Tinggi di masa depan adalah bagaimana misinya itu harus dirumuskan dan didefinisikan kembali dalam bentuknya yang lebih kontekstual untuk menghadapi tekanan perubahan-perubahan global yang semakin keras saat ini dan di masa depan. Misi Perguruan Tinggi harus dikontekstualisasikan dan direvitalisasi sehingga aktualisasinya melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi benar-benar memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan global. Implikasi kelembagaan aktualisasinya menurut Nasikun (2007) adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan kurikulum yang dibangun di atas akomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner, dimana komposisi mata kuliah memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan dialog antara disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan ilmu sendiri. Kedua, dalam penyelenggaraan program studi ilmu sosial dan humaniora, kebijakan yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis monisme epistemologis, teoretis, metodologis. Ketiga, struktur organisasi lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan harus dikembangkan. Menyadari akan tantangan perubahan baik lokal, nasional, maupun global semakin berat, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap mental cerdas, penuh tanggung jawab dari mahasiswa untuk mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan serta menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya menguasai Iptek serta dapat menemukan jati dirinya, dan dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanusiaan.

Menurut Aryana (2017:7-8) menyatakan bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan di atas langkah konkrit yang harus dilakukan adalah mengemas dan mengisi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan Tinggi dengan hal-hal sebagai berikut. 1) kemampuan-kemampuan berpikir kritis mahasiswa; 2) kemampuan mengenali dan mendekati masalah sebagai masyarakat global; 3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya; 4) kemampuan menyelesaikan konflik secara damai; 5) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan dan 6) kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil di atas, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi dewasa ini harus terus ditingkatkan walaupun menghadapi kendala yang cukup sulit dan berat. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi masih sangat banyak memerlukan perbaikan. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi harus bermutu tinggi, baik yang Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, sehingga belum cukup menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang bermutu dan mampu menghadapi tantangan global. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) di Perguruan Tinggi dalam upaya menumbuhkan nasionalisme sangat penting bagi mahasiswa.

#### **DAFTAR PUSAKA**

- Arifin, Muzayyin, 2010, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aryana, A.A. Gde 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dan Tantangan Global*. Jurnal. Fakultas Ilmu Budaya Perguruan Tinggi Udayana Denpasar. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/a751980b7858df68bbca910f444c1bd8.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/a751980b7858df68bbca910f444c1bd8.pdf).
- Djiwandono, J. Soedjati. 2000. “*Globalisasi dan Pendidikan Nilai*” dalam *Sindhunata (Ed), Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fuad Amsari. 1995. “*Pengajaran PKn di Indonesia: Perspektif Sosio Historis*”. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan PKn di Perdosenan Tinggi Umum di Yogyakarta tanggal 14-15 Oktober 1995.
- Maksum, Hafidh dan Faisal Anwar. 2016. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Globalisasi Dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme. Jurnal. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Saur. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, H.A.R. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Zakiya Daradjat, Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1987. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. oleh Bustami A.Ghani. dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.